

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung kinerja organisasi, termasuk instansi pemerintah. Pemanfaatan Informasi dan Teknologi (I&T) yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses kerja, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan I&T juga membawa berbagai risiko, seperti kebocoran data, kesalahan sistem, gangguan operasional, serta ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku (Butarbutar & Tanaamah, 2021). Apabila risiko I&T tidak dikelola dengan baik, layanan publik dapat terganggu dan data penting berpotensi hilang atau bocor. Selain itu, keluhan masyarakat dapat meningkat, dan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat (Aziza & Aviola, 2024). Dalam praktiknya, kondisi tersebut terlihat dari penanganan masalah yang lebih berfokus pada perbaikan setelah gangguan terjadi dibandingkan melalui langkah pencegahan yang terencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi belum memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang distandardisasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh proses organisasi.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Penerapan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat melalui mekanisme

evaluasi SPBE. Evaluasi ini menghasilkan nilai Indeks SPBE yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola dan manajemen SPBE pada setiap instansi. Penilaian SPBE dilakukan berdasarkan beberapa domain dan indikator, salah satunya adalah Domain Manajemen SPBE. Domain ini menilai penerapan proses manajemen, termasuk pengelolaan risiko, audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian internal. Dengan demikian, aspek manajemen risiko I&T secara tidak langsung menjadi bagian dari komponen yang dinilai dalam evaluasi SPBE.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 (Birokrasi, 2024), nilai Indeks SPBE Kabupaten Klungkung berada pada kategori baik. Namun demikian, pada Domain Manajemen SPBE masih terdapat aspek yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan domain lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum penerapan SPBE sudah baik, penguatan pada proses manajemen, termasuk manajemen risiko I&T, masih diperlukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian indeks SPBE yang baik belum secara otomatis mencerminkan konsistensi dan formalitas pelaksanaan proses manajemen risiko I&T pada tingkat operasional. Evaluasi SPBE menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*) yang bersifat umum dan belum menilai detail aktivitas di lapangan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kapabilitas proses (*process capability*) yang menilai aktivitas secara lebih rinci dan terstruktur.

Kebutuhan penguatan manajemen risiko I&T tersebut juga ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko SPBE secara

menyeluruh, mulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pemantauan dan pelaporan risiko (Permen PANRB, 2020). Ketentuan ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kewajiban dalam tata kelola instansi. Artinya, setiap instansi harus menerapkan pengelolaan risiko secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran yang mampu menilai secara jelas bagaimana proses manajemen risiko dijalankan pada tingkat aktivitas sehari-hari di instansi.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan infrastruktur I&T pemerintah daerah sekaligus sebagai pengampu utama penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung (Diskominfo Klungkung) menjadi instansi yang relevan untuk dilakukan pengukuran kapabilitas manajemen risiko I&T. Diskominfo berperan sebagai pengampu urusan komunikasi dan informatika yang memastikan sistem informasi dan layanan digital pemerintah daerah berjalan secara aman, andal, dan sesuai dengan kebijakan nasional (Parera & Tambotoh, 2024).

Meskipun regulasi dan kebijakan terkait manajemen risiko dan SPBE telah ditetapkan di tingkat nasional, implementasi manajemen risiko I&T pada pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian terdahulu mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan pedoman teknis yang spesifik, belum adanya penguatan melalui payung regulasi daerah yang eksplisit, serta konsistensi penerapan antar perangkat daerah. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik birokrasi pemerintahan yang umumnya memerlukan dasar hukum atau pedoman formal agar kebijakan teknis dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi (Enrique &

Fianty, 2023; Sutabri et al., 2024). Tanpa adanya pengaturan yang jelas, unit kerja cenderung berhati-hati dalam mengembangkan kebijakan teknis baru karena mempertimbangkan aspek legitimasi dan akuntabilitas administratif. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengukur kapabilitas proses manajemen risiko I&T menggunakan *framework* COBIT 2019 di lingkungan Diskominfo Klungkung. Kondisi ini menyebabkan organisasi belum memiliki gambaran terukur mengenai posisi kapabilitas proses manajemen risiko I&T yang telah berjalan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menilai bagaimana proses tersebut dijalankan. COBIT 2019 merupakan *framework* tata kelola dan manajemen I&T yang membantu memastikan bahwa penggunaan I&T selaras dengan tujuan organisasi. *Framework* ini digunakan karena menyediakan panduan terstruktur untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas penerapan manajemen risiko I&T. Melalui pendekatan ini, instansi dapat mengidentifikasi tingkat keterlaksanaan aktivitas manajemen risiko serta area yang masih memerlukan perbaikan. Secara khusus, domain *Ensure Risk Optimization* (EDM03) dan *Managed Risk* (APO12) dalam COBIT 2019 secara langsung mengatur pengelolaan risiko I&T pada tingkat tata kelola dan manajemen. Kedua domain ini membantu membedakan peran pimpinan dalam mengarahkan risiko dan peran pelaksana dalam menangani risiko sehari-hari (Lainhart, 2019). Pemisahan domain EDM03 dan APO12 memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih jelas antara aspek tata kelola risiko pada tingkat pimpinan dan pengelolaan risiko pada tingkat operasional.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan evaluasi SPBE. Sebaliknya, COBIT 2019 digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur proses manajemen risiko secara lebih rinci. Dengan demikian, studi ini berfokus pada pengukuran kapabilitas proses manajemen risiko I&T di tingkat internal instansi sebagai pelengkap evaluasi SPBE yang bersifat umum. Melalui pendekatan ini, hasil pengukuran diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada Diskominfo Klungkung secara lebih rinci. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendukung penguatan proses manajemen risiko I&T agar penerapannya lebih konsisten, terarah, dan terdokumentasi. Dengan demikian, setiap bidang memiliki cara kerja yang seragam dalam menghadapi risiko dan tidak bergantung pada kebiasaan masing-masing. Berdasarkan uraian permasalahan, kebutuhan evaluasi, serta urgensi penguatan manajemen risiko I&T pada pemerintah daerah, penelitian ini dilaksanakan dengan judul **“Pengukuran Kapabilitas Manajemen Risiko Informasi dan Teknologi (I&T) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Menggunakan *Framework* COBIT 2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada domain EDM03 dan APO12 berdasarkan *framework* COBIT 2019 di Diskominfo Klungkung?

2. Bagaimana kesenjangan antara tingkat kapabilitas proses manajemen risiko I&T saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan berdasarkan *framework* COBIT 2019 pada domain EDM03 dan APO12 di Diskominfo Klungkung?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kapabilitas proses manajemen risiko I&T di Diskominfo Klungkung berdasarkan hasil pengukuran kapabilitas menggunakan *framework* COBIT 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada domain EDM03 dan APO12 berdasarkan *framework* COBIT 2019 di Diskominfo Klungkung.
2. Menganalisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas proses manajemen risiko I&T yang saat ini diterapkan dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan berdasarkan *framework* COBIT 2019 pada domain EDM03 dan APO12 di Diskominfo Klungkung.
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kapabilitas proses manajemen risiko I&T di Diskominfo Klungkung berdasarkan hasil pengukuran kapabilitas proses menggunakan *framework* COBIT 2019.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada Diskominfo Klungkung sebagai objek penelitian. Pemilihan Diskominfo Klungkung sebagai fokus penelitian dilakukan karena instansi tersebut memiliki peran strategis sebagai pengampu utama urusan komunikasi, informatika, dan penyelenggaraan SPBE di tingkat pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, Diskominfo Klungkung dipilih sebagai objek studi awal untuk pengukuran kapabilitas manajemen risiko I&T.
2. Fokus penelitian pada Diskominfo Klungkung tidak dimaksudkan untuk membatasi replikasi metode penelitian, melainkan sebagai studi awal yang dapat diterapkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lain dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa.
3. Pengukuran kapabilitas manajemen risiko I&T dalam penelitian ini dibatasi pada domain EDM03 yang berfokus pada tata kelola risiko pada level strategis, dan APO12 yang berfokus pada manajemen risiko pada level operasional berdasarkan *framework* COBIT 2019.
4. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi seluruh domain dalam COBIT 2019 serta tidak membahas aspek tata kelola dan manajemen I&T di luar ruang lingkup manajemen risiko.
5. Pengukuran kapabilitas proses dilakukan berdasarkan kondisi eksisting pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi pada periode pengumpulan data dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi sebelum atau sesudah periode tersebut.

6. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat konseptual dan sebagai acuan awal perbaikan, disusun berdasarkan hasil pengukuran kapabilitas proses, dan tidak mencakup implementasi maupun evaluasi lanjutan atas rekomendasi tersebut.
7. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggantikan atau mengulang hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan berfokus pada pendalaman pengukuran kapabilitas proses manajemen risiko I&T sebagai pelengkap terhadap hasil evaluasi SPBE yang bersifat makro.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata kelola I&T, khususnya terkait penerapan *framework* COBIT 2019 dalam pengukuran kapabilitas proses manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas manajemen risiko I&T, terutama yang berfokus pada pengukuran kapabilitas proses dan penyesuaian *framework* tata kelola I&T dengan konteks organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada Diskominfo Klungkung

berdasarkan domain EDM03 dan APO12 dalam *framework* COBIT 2019. Hasil pengukuran yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi untuk memahami kondisi eksisting manajemen risiko I&T serta mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan awal dalam upaya peningkatan kapabilitas proses manajemen risiko I&T secara bertahap dan terarah, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan organisasi.

3. Manfaat Kebijakan dan Organisasi

Dari sisi kebijakan dan organisasi, penelitian ini diharapkan memberikan masukan berbasis hasil pengukuran kapabilitas proses yang dapat mendukung penguatan implementasi manajemen risiko dalam kerangka kebijakan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Hasil penelitian ini dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam perencanaan penguatan tata kelola I&T, serta membantu instansi dalam menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang selaras dengan kerangka kebijakan nasional dan standar tata kelola I&T yang berlaku.